



Buletin Parlementaria



3 Suarakan
Perdamaian Dunia
di Meksiko



4 Bahas Kerja Sama
Keamanan Siber
dengan Australia



Pengguna Narkoba
Dapatkan
Restorative Justice,
Apa Sebabnya?



Mengkhawatirkan,
Jumlah Petani di
Sulsel Tiap Tahun
Makin Berkurang!



Bantuan
Biaya Pendidikan
Harus Tepat Sasaran

Nomor 1292/11/V/2024 Mei 2024



9 772614 339005



Bantuan Biaya Pendidikan Harus Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroiti masih terjadinya penyaluran bantuan biaya pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang ia nilai kurang tepat sasaran. Menurutnya, pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.

“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi *reviewing* para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5).

Ia bilang, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai *Youtuber* atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.



Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).

“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui *review* tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai

IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.

Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.

Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka. **skr/aha**

DINAMIKA EKONOMI PENERIMA BISA BERUBAH SECARA SIGNIFIKAN, MISALNYA ADA YANG ORANG TUANYA MENDADAK MENJADI PENGUSAHA BESAR ATAU MAHASISWA TERSEBUT BERHASIL SEBAGAI YOUTUBER ATAU SELEBRITAS MEDIA SOSIAL DENGAN PENGHASILAN YANG CUKUP BESAR.



Dede Yusuf Macan Effendi
Wakil Ketua Ko-misi X DPR R



Suarakan Perdamaian Dunia di Meksiko



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat mengikuti agenda 10th MIKTA Speakers' Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024).

FOTO: IST/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri agenda 10th MIKTA Speakers' Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024) siang waktu setempat. Agenda ini merupakan forum pertemuan konsultatif antara negara-negara kekuatan menengah (*middle power*) yang terdiri dari negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.

Forum ini mengusung tema 'The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World'. Saat berbicara, dirinya mengingatkan agar para anggota MIKTA menjembatani perbedaan dan menurunkan ketegangan akibat polarisasi antar kekuatan besar.

"Negara anggota MIKTA perlu mendapat kepercayaan dari berbagai kekuatan besar untuk berperan sebagai *honest broker*. MIKTA juga perlu mendorong pelaksanaan tatanan internasional yang berbasis aturan (*rules-based international order*)," tutur Puan melalui rilis kepada **Parlementaria**, Selasa (7/5).

Diketahui, *honest broker* kerap digunakan dalam kapasitas seseorang atau lembaga sebagai mediator yang netral. *Honest broker* menyampaikan pandangan dari dua sisi berbeda dalam sebuah persetujuan atau tidak persetujuan, sehingga membantu keduanya untuk mencapai kesepakatan bersama. **um/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibrurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindyia, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom.,
Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setiantio, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitomput, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budlati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Alfdillah, Gerald Opie,
Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P,
Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhani, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha,
Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita,
Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrusna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Bahas Kerja Sama Keamanan Siber dengan Australia

Komisi I DPR RI menerima Kunjungan Kehormatan (*courtesy call*) dari delegasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Australia, yang dipimpin Clare O'Neil di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menjelaskan pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama di bidang keamanan siber (*cyber security*).

Merespon hal itu, ia mengaku mendukung usulan kerja sama tersebut. Sebab, Indonesia memiliki jumlah demografi yang sangat besar, dan pengguna internet aktif terbanyak di dunia. Selain dari teknologinya yang maju, ia mengungkapkan bahwa dalam kesempatan itu, mereka memahami bahwa persoalan keamanan siber tidak dapat ditangani sendiri. Maka dari itu, menurutnya, Indonesia bisa belajar dengan Australia.

"Siber itu kan *borderless* ya jadi ini permasalahan banyak



negara. Jadi tadi ia mengajak kerja sama Indonesia terutama karena pengguna internet Indonesia juga salah satu yang terbesar di dunia dan juga aktif bagaimana kita mengamankan ranah-*ranah* siber kita bersama sama," ungkap Meutya usai pertemuan, Rabu (8/5).

Oleh karenanya, ia menilai Indonesia perlu bekerja sama dengan negara yang memiliki perhatian dan pemahaman yang sama. "Termasuk dengan Australia," imbuhnya

Upaya pengamanan media siber di Indonesia telah diupayakan melalui UU ITE yang telah direvisi juga UU Perlindungan Data Pribadi. Menurut Meutya, hal tersebut merupakan langkah yang bagus. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan akan dibentuknya UU Pengamanan Siber secara khusus di periode DPR RI mendatang.

"UU tersebut memberikan kekuatan kepada BSSN untuk kemudian mengambil langkah-langkah. Sekarang BSSN-nya bagus ya, meskipun banyak catatan karena kemarin serangan-serangan juga banyak terjadi ya memang karena BSSN nya ini belum dalam wadah UU," harapnya. [hal,ar/rdn](https://hal.ar/rdn)

SIBER ITU KAN *BORDERLESS* YA JADI INI PERMASALAHAN BANYAK NEGARA. JADI TADI IA MENGAJAK KERJA SAMA INDONESIA TERUTAMA KARENA PENGGUNA INTERNET INDONESIA JUGA SALAH SATU YANG TERBESAR DI DUNIA DAN JUGA AKTIF BAGAIMANA KITA MENGAMANKAN RANAH-RANAH SIBER KITA BERSAMA SAMA.

Meutya Hafid

Ketua Komisi I DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Bangun Kerukunan Bernegara Lewat ‘Presidential Club’

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyambut baik wacana presiden terpilih Prabowo Subianto yang berencana membuat perkumpulan presiden terdahulu atau *Presidential Club*. Dirinya menilai keinginan Prabowo itu sangat luar biasa jika berhasil diwujudkan.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan dengan adanya *Presidential Club* tersebut maka Prabowo dinilai akan lebih mudah bekerja sebagai presiden. Sebab, ia akan dibantu oleh para tokoh bangsa terdahulu yang memiliki pengalaman memimpin Indonesia.

“Jadi itu bagus kalau itu bisa diwujudkan ya luar biasa. Mungkin Pak Prabowo dan presiden-presiden berikutnya akan lebih mudah bekerjanya,” ujar Doli kepada **Parlementaria** usai memimpin Tim Kunker Reses Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Bali, Senin (6/5).



FOTO: OJI/PDT

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai memimpin Tim Kunker Reses Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Bali, Senin (6/5/2024).

Legislator asal Dapil Sumatera Utara III itu juga menilai Indonesia yang notabene negara besar dengan

permasalahan-permasalahan yang besar juga membutuhkan situasi yang kondusif.

“Artinya elit-elit kita ini [akan] sering berkomunikasi yang baik, yang intensif. Apalagi kemudian yang berkumpul itu adalah para tokoh-tokoh bangsa, bapak-ibu bangsa yang sudah punya pengalaman memimpin Indonesia dan saya kira itu menjadi baik,” jelasnya.

Doli melanjutkan bahwa Indonesia juga butuh kerukunan, sinergitas, dan kesolidan dari para tokoh-tokoh besar. “Bisa juga jadi teladan buat kita bahwa untuk membangun Indonesia ini ya memang membutuhkan kerukunan soliditas, sinergitas begitu itu yang paling penting,” pungkasnya. **oji/rdn**



JADI ITU BAGUS KALAU ITU BISA DIWUJUDKAN YA LUAR BIASA. MUNGKIN PAK PRABOWO DAN PRESIDEN-PRESIDEN BERIKUTNYA AKAN LEBIH MUDAH BEKERJANYA.

Ahmad Doli Kurnia Tandjung
Ketua Komisi II DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



BPJS Ketenagakerjaan bagi Badan Ad Hoc Pemilu Tetap Diperlukan

Jaminan sosial bagi badan *ad hoc* Pemilu, seperti PPK, PPS, KPPS, dan sebagainya, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam bentuk biaya santunan kecelakaan kerja mulai dari meninggal, cacat permanen, ringan bahkan pemakaman. Kondisi ini membuat KPU tidak lagi mengalokasikan anggaran khusus untuk jaminan kesehatan badan *ad hoc* tersebut melalui asuransi ketenagakerjaan.

Walakin, Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menilai Badan *Ad Hoc* Pemilu ini sebaiknya tetap didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu agar dapat memberikan perlindungan, khususnya bagi para peserta KPPS. Hal ini mengingat banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 lalu.

"Harus dijamin di BPJS Ketenagakerjaan, seperti Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021. Bila ada



Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (6/5/2024).

pelaksana mengalami kelelahan dan sakit, sampai meninggal dunia, bahkan kerusuhan di tempat, itu dijamin semua dalam program jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan," ujar Toha dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi

II DPR RI, di Denpasar, Bali, Senin (6/5).

Politisi Fraksi PKB ini lalu menjelaskan biaya yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kesehatan adalah sebesar Rp16.800. Dari nominal tersebut, sebanyak Rp10.000 untuk kecelakaan kerja dan Rp6.800 untuk kematian. Jumlah ini menurutnya tidak memberatkan secara finansial.

Legislator asal Dapil Jawa Tengah V ini berharap, baik pemerintah pusat maupun daerah bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan perlindungan yang lebih komprehensif. Upaya ini tidak hanya mencakup perlindungan terhadap para pelaksana Pemilu, melainkan juga melibatkan perhatian khusus terhadap kebutuhan ahli waris dan keluarga mereka. [oji/rdn](#)



HARUS DIJAMIN DI BPJS KETENAGAKERJAAN, SEPERTI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2021. BILA ADA PELAKSANA MENGALAMI KELELAHAN DAN SAKIT, SAMPAI MENINGGAL DUNIA, BAHKAN KERUSUHAN DI TEMPAT, ITU DIJAMIN SEMUA DALAM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI BPJS KETENAGAKERJAAN.

Mohammad Toha

Anggota Komisi II DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya

Pengguna Narkoba Dapatkan *Restorative Justice*, Apa Sebabnya?

Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba mendapatkan perhatian serius dari Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa. Ia berharap tingginya kasus tersebut tidak justru ditangani dengan pidana penjara, melainkan cukup diselesaikan dengan Keadilan Restoratif (*restorative justice*).

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasarnya, pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

"Kami mengharapkan justru dengan pelaksanaan *restorative justice* yang saat ini cukup luar biasa khususnya di Kejaksaan, kami



FOTO: RDN/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa, saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI di Bandar Lampung, Lampung, Selasa (30/4/2024).

berharap justru para pengguna narkoba ini bukan dimaksudkan ke dalam penjara tapi bisa dilakukan *restorative justice*," jelas Adde saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI di

Bandar Lampung, Lampung, Selasa (30/4).

Oleh karena, menurutnya, jika pengguna narkoba tersebut, misalnya, hanya menggunakan 1-2 gram narkoba atau bisa jadi hanya coba-coba, namun saat berada di penjara malah akan bertemu dengan gempong besar bandar. Sehingga, pidana penjara bukannya sebagai tempat untuk mengurangi kasus kecanduan malah semakin merusak karena akan memunculkan mafia narkoba yang baru.

"Jadi kami berharap *restorative justice* ini kembali bisa dilakukan kepada pengguna narkoba yang baru coba-coba saja. Sehingga, narapidana khususnya penjara tidak *overcrowded*, sehingga Kemenkumham bisa memberikan pelayanan terbaik," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

rdn

KAMI MENGHARAPKAN JUSTRU DENGAN PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* YANG SAAT INI CUKUP LUAR BIASA KHUSUSNYA DI KEJAKSAAN, KAMI BERHARAP JUSTRU PARA PENGGUNA NARKOTIKA INI BUKAN DIMAKSUDKAN KE DALAM PENJARA TAPI BISA DILAKUKAN *RESTORATIVE JUSTICE*.

Adde Rosi Khoerunnisa

Anggota Komisi III DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Mengkhawatirkan, Jumlah Petani di Sulsel Tiap Tahun Makin Berkurang!

Anggota Komisi IV DPR Slamet menyatakan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah petani di Sulawesi Selatan dalam sepuluh tahun terakhir semakin mengkhawatirkan. BPS Sulawesi Selatan merilis hasil sensus pertanian (ST 2023) di Sulsel yang menunjukkan adanya penurunan jumlah petani. Dari 1.173.954 unit usaha pertanian (UTP) tahun 2013, kini menjadi 1.121.665 pada tahun 2023, ada penurunan sebesar 4,45 persen atau sekitar 52.289 selama sepuluh tahun terakhir.

"Pemerintah harus meyakinkan, membuat program yang bisa memastikan bahwa proses peralihan fungsi profesi petani ini tidak hilang, kenapa? karena ini terkait dengan keseluruhan petani kita. Kami menemukan di Makassar ini, proses peralihan fungsi lahan dan alih fungsi profesi petani ini tinggi dan bukan tidak mungkin ini pasti terjadi di seluruh Indonesia," ujar



Anggota Komisi IV DPR Slamet saat mengikuti Kunker Reses Komisi IV DPR di Kantor Bulog Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/5/2024).

Slamet saat mengikuti Kunker Reses Komisi IV DPR di Kantor Bulog Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/5).

Menurut Politisi F-PKS ini, solusi dari permasalahan ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu bagaimana

agar pemerintah dapat meyakinkan kalau petani berproduksi dapat untung dan ada kesehatan yang terjamin. Sehingga, mereka akan tetap akan menjadi profesi petani.

Selain itu, menurut Deputi Bidang PPKP Kementerian Pertanian, Andriko Noto Susanto, luas tanam dan produksi padi memang menurun tajam. Luas tanam Oktober 2023 s.d. Februari 2024 hanya 5,4 juta ton atau menurun 1,9 juta hektar di banding periode yang sama 2015-2019 yang mencapai 7,4 juta hektar.

Sementara produksi beras sejak tahun 2019-2023 hanya berkisar 30 sampai 31 juta ton jauh lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar 34 juta ton. Kebutuhan nasional per-tahun rata-rata 31,2 juta ton, artinya terjadi kekurangan pasokan dari dalam negeri. [jk/rdn](#)

PEMERINTAH HARUS MEYAKINKAN, MEMBUAT PROGRAM YANG BISA MEMASTIKAN BAHWA PROSES PERALIHAN FUNGSI PROFESI PETANI INI TIDAK HILANG, KENAPA? KARENA INI TERKAIT DENGAN KESELURUHAN PETANI KITA. KAMI MENEMUKAN DI MAKASSAR INI, PROSES PERALIHAN FUNGSI LAHAN DAN ALIH FUNGSI PROFESI PETANI INI TINGGI DAN BUKAN TIDAK MUNGKIN INI PASTI TERJADI DI SELURUH INDONESIA.

Slamet

Anggota Komisi IV DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Dorong Pembangunan Irigasi dan Jalan di Kabupaten Jeneponto

Komisi V DPR RI menerima audiensi DPRD Kabupaten Jeneponto terkait koordinasi dan konsultasi pengusulan jalan dan pemeliharaan saluran irigasi Kelara-Karalloe, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menerangkan, terkait buruknya kondisi irigasi yang bersumber dari Sungai Kelara, pihaknya akan segera bersurat kepada kementerian terkait agar segera membantu pembangunan irigasi sesegera mungkin, mengingat pentingnya fungsi irigasi tersebut bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

"Yang jadi masalah sekarang ini

adalah irigasi yang bersumber dari Sungai Kelara di sana. Itu sumber penghidupan rakyat. Air di sana dari situ bobol. Makanya rakyat di sana bergotong royong. Balai pompengan di sana tidak mampu berbuat apa-apa. Makanya kita *take over*. Saya suruh buat surat untuk segera dikirim ke Jakarta untuk membantu pembangunan sesegera mungkin," kata Hamka saat ditemui usai audiensi di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (14/5).

Selain itu, Hamka juga menyoroti belum maksimalnya fungsi perairan Bendungan Karalloe. Bendungan yang telah memakan biaya lebih dari Rp800 miliar ini dinilai belum memiliki efek yang signifikan bagi

kehidupan masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

Hamka menambahkan, dari segi infrastruktur pihaknya berfokus pada dua hal di Kabupaten Jeneponto, yakni masalah irigasi dan masalah jalan. Menurutnya, dua hal ini menjadi titik tolak untuk meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Jeneponto, khususnya bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto Khaidir Adi Saputra berharap bantuan terkait masalah irigasi dan jalan segera hadir di wilayahnya, mengingat keduanya sangat dibutuhkan bagi masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Jeneponto. **we/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Foto bersama Komisi V DPR RI usai menerima audiensi DPRD Kabupaten Jeneponto di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Pelepasan Jemaah Haji Kloter Pertama Berjalan Lancar



FOTO: AAS/PDT

Anggota Komisi VIII DPR RI Itje Siti Dewi Kuraesin, saat melepas Jemaah Haji kloter pertama pada Asrama Haji Indramayu di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Minggu (12/05/2024).

Anggota Komisi VIII DPR RI, Itje Siti Dewi Kuraesin melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Itje menjelaskan Kunsfik itu dalam rangka pelepasan Jemaah Haji kloter pertama pada Embarkasi Kertajati tahun 1445 H/2024 M di Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, keberangkatan kloter pertama haji ini berjalan dengan lancar. Mengingat hari ini, sebanyak 440 jemaah haji dari Kabupaten Subang memulai perjalanan suci mereka menuju Kota Madinah, Arab Saudi.

"*Alhamdulillah*, ini semua berjalan lancar. Mereka semua sudah berada di dalam pesawat, yang sebentar lagi tentunya akan berangkat menuju Kota Madinah, Arab Saudi," kata Itje Siti Dewi Kuraesin kepada Parlementaria usai melaksanakan pelepasan Jemaah Haji kloter pertama pada Asrama Haji Indramayu di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Minggu (12/5).

Dalam kunjungan tersebut, Itje mengatakan bahwa jumlah jemaah haji dari Kabupaten Subang akan terus bertambah dalam beberapa hari mendatang, yang mencapai total sekitar 1.200 orang. Selain itu,

sebanyak 30 kloter lain dari seluruh provinsi Jawa Barat akan berangkat dari Bandara Kertajati.

Dalam konteks keberangkatan yang melibatkan jemaah lanjut usia (lansia), Itje menjelaskan bahwa mereka mendapatkan pendampingan dan diizinkan membawa pendamping. Dengan harapan, akan keselamatan dan kesehatan para jemaah.

Legislator Dapil Jawa Barat menekankan pentingnya kerja sama dan peningkatan dengan Kementerian Agama (Kemendagri). Khususnya dalam hal untuk meningkatkan kualitas dan pelaksanaan ibadah haji.

aas/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Apresiasi Peran Desa Dukung Ketenagakerjaan di Badung



FOTO: BIA/PDT

Anggota Komisi IX Edy Wuryanto, saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (11/5/2024).

Salah satu agenda Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Badung, Bali, adalah mengunjungi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Rahayu Sedana Luih (Ransel) di Badung, Bali. Dalam kunjungan ke salah satu LPK milik swasta tersebut, Komisi

IX DPR RI mendapati peran penting desa hingga pemerintah kabupaten yang memberikan dukungan penuh terhadap ketenagakerjaan.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah dimanfaatkannya dana desa untuk memberikan dukungan kepada anak-anak dari beberapa desa di Kabupaten Badung untuk

mendapatkan pelatihan kerja di LPK Ransel. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengapresiasi langkah tersebut menjadi salah satu hal yang sangat positif. Sehingga, hal ini dapat menjadikan Kabupaten Badung dapat mengatasi pengangguran hingga nol persen.

“Saya kira ini positif dan juga saya lihat tadi pemerintah kabupaten sudah men-*support*, terutama untuk pembiayaan sertifikasi setelah mereka lulus LPK, karena sertifikat kompetensi level internasional terutama itu dibutuhkan agar mereka ada jaminan keluar negeri dengan tenaga kerja yang punya *skill* dan punya kemampuan bahasa yang baik,” kata Edy di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (11/5).

Edy pun berharap, ke depan, BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dapat memberikan perhatian kepada LPK-LPK serupa. Terutama bagi Bali yang menjadi salah satu provinsi yang menyumbang banyak pekerja migran di luar negeri di sektor *hospitality*.

“Harapan saya ke BP2MI atau Kemenaker memberi perhatian LPK-LPK seperti ini. Bahkan kalau perlu Bali ini kan sebagai salah satu daerah kabupaten dan provinsi migran ya banyak orang Bali yang bekerja di luar negeri terutama sektor *hospitality*, sektor spa. Saya kira kalau Bali menjadi *role model* bagi LPK-LPK di Indonesia untuk *link-link* itu bisa dikerjasamakan dengan baik, menjadi contoh yang baik,” harap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

bia/rdn

SAYA KIRA INI POSITIF DAN JUGA SAYA LIHAT TADI PEMERINTAH KABUPATEN SUDAH MEN-*SUPPORT*, TERUTAMA UNTUK PEMBIAYAAN SERTIFIKASI SETELAH MEREKA LULUS LPK, KARENA SERTIFIKAT KOMPETENSI LEVEL INTERNASIONAL TERUTAMA ITU DIBUTUHKAN AGAR MEREKA ADA JAMINAN KELUAR NEGERI DENGAN TENAGA KERJA YANG PUNYA *SKILL* DAN PUNYA KEMAMPUAN BAHASA YANG BAIK.

Edy Wuryanto

Anggota Komisi IX DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



KECANDUAN GAME = PENYAKIT GANGGUAN MENTAL?



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mendorong pemerintah memperketat akses anak terhadap gim daring, khususnya gim yang mengandung kekerasan. Hal ini untuk melindungi anak dari dampak negatif game online. "Kami serukan kepada pemerintah pengetatan akses game online untuk anak-anak di bawah umur seperti pembatasan jam bermain ponsel. Karena berdampak pada tumbuh kembang anak yang berujung pada perilaku agresif sampai paparan pornografi," gim daring yang mengandung kekerasan banyak mempengaruhi perilaku anak-anak, sebab gim tersebut dapat mempengaruhi psikologi anak-anak. "Ada kelakuan yang berulang, seperti top up. Uang sekolah habis untuk top up game online. Kami sangat prihatin sekali, terutama pendidikan dan perilaku anak-anak ini,"

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi menetapkan kecanduan video game online ke dalam versi terbaru ICD sebagai **penyakit gangguan mental**.

Ciri-ciri Kecanduan Video Game Online

- 1** Tidak dapat mengendalikan diri sehingga ingin selalu bermain game
- 2** Lebih memprioritaskan bermain game ketimbang aktivitas keseharian
- 3** Intensitas bermain game semakin sering meskipun ada dampak negatif yang dirasakan
- 4** Pola perilaku tersebut sudah berlangsung **selama 12 bulan**
- 5** **Kecanduan game online menyebabkan gangguan** pada fungsi pribadi, keluarga, sosial, pendidikan, dan aspek penting lainnya



YUK, KENALI KRITERIA KECANDUAN VIDEO GAME ONLINE PADA KELUARGA DAN ORANG DI SEKITAR KITA!

Sumber : WHO, KEMENKES

Optimalisasi Pendidikan Vokasi Terus Didorong

Komisi X DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua, Abdul Fikri Faqih, melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Sumatera Selatan pada Senin (6/5). Komisi ini memulai kunjungan pertamanya di SMK N 2 Palembang.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi X diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Sutoko. Dalam sambutannya, Sutoko menyampaikan bahwa SMK N 2 Palembang memiliki jumlah peserta didik sebanyak 2500 siswa. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah tingginya angka pengangguran terbuka di kalangan lulusan SMK.

Diketahui, beberapa kendala-kendala yang dihadapi sekolah, seperti keterbatasan peralatan yang belum sepenuhnya terkabarkan dan sesuai standar. Ditambah lagi, sumber daya manusia yang belum memadai

Menanggapi hal itu, Abdul Fikri Faqih mengatakan pentingnya



FOTO: RIA/PDT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, Senin (6/5/2024).

meningkatkan peralatan dan kompetensi guru dalam mendukung pendidikan vokasi di SMK N 2

Palembang. “Program revitalisasi peralatan dan peningkatan tenaga pengajar sangat penting untuk memperbaiki kondisi tersebut,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mendorong pendidikan vokasi untuk terus berupaya menjalin kerja sama dengan dunia usaha serta dunia industri (DUDI). “Langkah ini bertujuan supaya *link and match* dengan dunia industri dapat terus berjalan,” harapnya.

Kegiatan ini dalam rangka menyerap aspirasi dan menyampaikan progres kerja DPR RI. Dimana hasilnya dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan pada rapat di komisi X. [rnm/aha](#)

“
PROGRAM REVITALISASI PERALATAN DAN
PENINGKATAN TENAGA PENGAJAR SANGAT PENTING
UNTUK MEMPERBAIKI KONDISI TERSEBUT.
LANGKAH INI BERTUJUAN SUPAYA *LINK AND MATCH*
DENGAN DUNIA INDUSTRI DAPAT TERUS BERJALAN.

Abdul Fikri Faqih

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Bahas Investasi Sektor Keuangan dengan Parlemen Korsel

Komisi XI DPR RI menerima kunjungan dari perwakilan Parlemen Korea Selatan (Korsel) di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5). Pertemuan itu membahas beberapa hal yang berkaitan dengan investasi di sektor keuangan, mulai dari masalah ketenagakerjaan hingga regulasi dalam pembukaan cabang perbankan.

Dari Delegasi Parlemen Korea hadir Back Hye-ryun yang merupakan Pimpinan Komite Kebijakan Nasional pada Parlemen Korea yang diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir

Uskara beserta beberapa anggota Komisi XI DPR RI. Adapun tugas Komite Kebijakan Nasional tersebut salah satunya membawahi bidang keuangan.

“Kami banyak diskusi terkait dengan persoalan keuangan terutama investasi Korea di sektor keuangan yang ada di Indonesia. Tadi disampaikan beberapa keluhan dari investor finansial Korea yang ada di Indonesia termasuk dalam persoalan KITAS atau izin kerja untuk masyarakat Korea,” tutur Amir.

Terkait dengan masalah tersebut, anggota dewan yang hadir memberikan penjelasan bahwa persoalan tenaga kerja asing di

Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Amir tak menampik bahwa Indonesia membutuhkan investasi negara lain namun proteksi terhadap tenaga kerja dalam negeri juga harus dilakukan apalagi dengan kapasitas dan kemampuan yang setara.

“Memang kita butuh investasi tapi di sisi lain kita juga ingin memproteksi tenaga kerja yang sudah ada di sini dan punya kemampuan dengan kapasitas yang sama, tidak usah membawa dari luar. Kita sudah atur dalam undang-undang tenaga kerja dan ini kita sampaikan tadi,” ujarnya. —uc/rdn

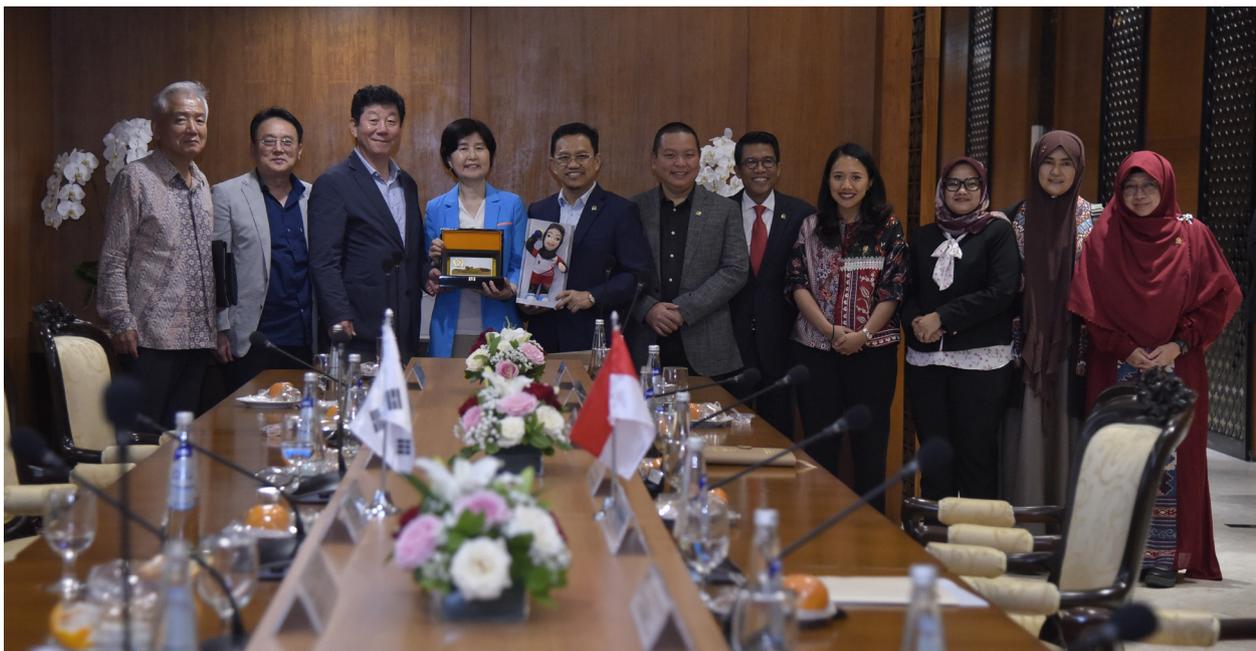


FOTO: MUN/PDT

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara foto bersama usai menerima kunjungan dari perwakilan Parlemen Korea di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Pastikan Angkasa Pura Soetta Beri Layanan Prima

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Dimiyati Natakusumah memastikan Angkasa Pura II memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang ingin berpergian melalui moda transportasi udara di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Menurutnya, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam penerbangan merupakan hal penting yang harus dilakukan Angkasa Pura II kedepannya.

“Kita ingin memastikan bagaimana Angkasa Pura II beserta perangkat-perangkatnya memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Pelayanan prima harus diberikan dari pintu depan sampai keluar. Pelayanan itu jangan lagi lama, susah, ruwet, dan sulit, masyarakat harus diberikan kemudahan,” jelas Dimiyati usai memimpin Kunjungan Kerja BURT



ke Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (8/5).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS itu turut mengapresiasi kinerja Angkasa Pura II yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. “*Alhamdulillah* kinerjanya makin baik makin bagus dari tahun sebelumnya. Itulah tugas kami DPR RI

memberikan pengawasan, perhatian, serta dukungan moral maupun moril untuk mereka semua,” ungkap Dimiyati.

Ia menambahkan, Bandara Soetta sebagai pintu gerbang masuk kedatangan tamu-tamu mancanegara harus dipastikan dilayani dengan pelayanan terbaik **tra/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua BURT DPR RI Dimiyati Natakusumah dalam foto bersama usai memimpin Kunjungan Kerja BURT ke Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (8/5/2024).

FOTO: TRAP/PTI

Air Bersih dan Sanitasi Jadi Komitmen Bersama

Tema penyelenggaraan *World Water Forum* (WWF) ke-10 yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei 2024 mendatang ialah *Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity*. Tema ini menunjukkan perhatian serius dunia global akan manajemen isu air demi kepentingan masa depan air untuk kesejahteraan bersama.

"Jadi ini harus dibawa sebagai satu persoalan politik, politik air ya untuk *water security* kita. Dan dalam hal ini parlemen dengan *network* (misalnya) bekerja sama BKSAP DPR bekerja sama dengan *Inter-Parliamentary Union* (IPU) atau Organisasi Parlemen Dunia, ini bagian dari *parliamentary diplomacy*, peran serta dan juga kontribusi kita bagi persoalan *SDG's*," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon dalam wawancara eksklusif dengan TVR Parlemen, baru-baru ini.

Fadli menambahkan, persoalan



Ketua BKSAP Fadli Zon (kanan) dalam wawancara eksklusif dengan TVR Parlemen di Jakarta.

air menjadi salah satu tujuan dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's 2030). Hal ini menyangkut ketersediaan air

bersih dan sanitasi yang memang sudah menjadi komitmen bersama yang disepakati seluruh dunia.

"Menurut saya prioritasnya adalah air bersih dan sanitasi. Ini penting terutama di negara-negara berkembang, di negara-negara selatan ya *Global South* ini masih mempunyai masalah dengan air bersih dan sanitasi, karena air bersih dan sanitasi ini akan menjadi salah satu prasyarat bagi peningkatan kualitas hidup manusia," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Ketersediaan air bersih dan sanitasi tersebut di samping untuk pangan, juga sebagai bagian dari penataan irigasi. Penggunaan air bersih yang bijaksana, juga termasuk penekanan pembahasan dalam forum yang juga melibatkan masyarakat tersebut. **bia/rdn**

MENURUT SAYA PRIORITASNYA ADALAH AIR BERSIH DAN SANITASI. INI PENTING TERUTAMA DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, DI NEGARA-NEGARA SELATAN YA GLOBAL SOUTH INI MASIH MEMPUNYAI MASALAH DENGAN AIR BERSIH DAN SANITASI, KARENA AIR BERSIH DAN SANITASI INI AKAN MENJADI SALAH SATU PRASYARAT BAGI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MANUSIA.

Fadli Zon

Ketua BKSAP DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Harapan Kerja Sama Indonesia-Hungaria Semakin Meningkatkan

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR - Parlemen Hungaria Amir Uskara didampingi oleh Mukhamad Misbakhun menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria (H.E) Lilla Karsay. Dalam pertemuan ini, Amir mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara Hungaria dan Indonesia selama 69 tahun terakhir di berbagai bidang.

Kerja sama itu di antaranya meliputi politik, ekonomi, perdagangan, sosial budaya, pertahanan, dan yang paling penting adalah kerja sama antar-parlemen, yang diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi rakyat di kedua belah pihak. "Oleh karena itu, saya berharap melalui pertemuan ini, kita dapat meningkatkan kemitraan bilateral kita, khususnya melalui Grup Kerja Sama Bilateral kita," papar Amir ditemui di Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/5).



FOTO: RSB/PDI

Ketua GKSB DPR - Parlemen Hungaria Amir Uskara didampingi oleh Mukhamad Misbakhun saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria (H.E) Lilla Karsay di Nusantara III, DPR RI.

Politisi dari Fraksi PPP ini mencatat bahwa Indonesia dan Hungaria telah menjalin kerja sama melalui pembuatan MoU di berbagai bidang seperti pendidikan, produk halal, teknik, olahraga, infrastruktur, air bersih, dan pariwisata. Amir pun berharap mekanisme kerja

sama yang ada dapat memberikan manfaat bagi kedua negara.

Dalam kesempatan ini, Amir berpandangan bahwa kerja sama bilateral Indonesia dan Hungaria perlu ditingkatkan lebih besar dari sebelumnya, karena dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Termasuk perang, konflik, dan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, krisis iklim terus berlanjut, sementara inflasi dan kenaikan harga energi terus meningkat.

Amir berpendapat bahwa diplomasi parlemen melalui hubungan multilateral dan bilateral memainkan peran yang sangat strategis dalam memajukan kerja sama di berbagai bidang seperti mendorong demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perdamaian, keamanan, dan memperdalam hubungan bilateral antar negara. **ssb/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Indonesia dan Qatar Punya Kesamaan Pandangan Soal Gaza

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Duta Besar Qatar Fawziya Edrees Salman Al-Sulaiti. Dalam pertemuan bilateral ini Fadli mengungkapkan, bahwa Indonesia dan Qatar memiliki kesamaan pandangan mengenai permasalahan Gaza dan Palestina.

Kedua negara juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia pun akan terus melakukan hal tersebut selama Palestina belum merdeka, dan diakui sebagai negara yang bebas serta berdaulat. "Saya juga ingin menyampaikan solidaritas penuh kami kepada Qatar atas serangan yang dilakukan otoritas Israel untuk menutup kantor Al-Jazeera di Yerusalem," papar Fadli di ruang delegasi Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

Menurut Fadli, Narasi bahwa Al-Jazeera adalah ancaman terhadap keamanan nasional Israel adalah hal yang menggelikan, dan situasi seperti ini akan selamanya dikenang sebagai hari kelam bagi demokrasi



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Duta Besar Qatar Fawziya Edrees Salman Al-Sulaiti di ruang delegasi Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

dan kebebasan pers, sebuah prinsip yang paling sering diklaim dijunjung oleh mereka yang sangat mendukungnya.

Indonesia dan Qatar merupakan

pendukung perdamaian di kawasan. Nyawa yang hilang dalam serangan militer Israel di Gaza sungguh di luar pemahaman. Korban sipil dan situasi di Gaza berada di luar bencana.

"Saya menghargai peran Qatar sebagai mediator perdamaian yang jujur antara Hamas dan Israel. Indonesia siap mendukung Qatar, namun pada saat yang sama tetap waspada untuk meninjau kembali standar ganda yang diterapkan oleh Israel dan sekutunya," jelas Fadli.

ssb/aha

INDONESIA SIAP MENDUKUNG QATAR, NAMUN PADA SAAT YANG SAMA TETAP WASPADA UNTUK MENINJAU KEMBALI STANDAR GANDA YANG DITERAPKAN OLEH ISRAEL DAN SEKUTUNYA.

Fadli Zon

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Capaian Kuartal-I 2024 Belum Bisa Jadi Prediksi Gambaran Ekonomi



FOTO: MUN/PDT

Wakil BAKN DPR RI Anis Byarwati.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2024 sudah baik sebagai modal awal. Sebelumnya, BPS RI telah merilis angka pertumbuhan

ekonomi Indonesia pada kuartal I-2024 tumbuh sebesar 5,11 persen. Meski begitu Anis mengingatkan hal tersebut masih terlalu dini untuk memprediksi kondisi tersebut akan menjadi gambaran ekonomi hingga akhir tahun 2024.

“Tantangan ketidakpastian ekonomi dan volatilitas keuangan global

masih sangat tinggi. Fenomena (di Amerika Serikat yang) *higher for longer* untuk menggambarkan tingkat inflasi dan suku bunga (juga) bisa memicu pertumbuhan ekonomi *weaker for longer* (di Indonesia). Ekonomi global masih sangat ringkih dan rapuh inilah yang kita khawatirkan akan berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional,” tutur Anis dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Jumat (10/5).

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga berpandangan bahwa tantangan semakin berat ke depannya. Kondisi geopolitik yang sedang memanas di banyak kawasan, akan membuat perekonomian global akan goncang, terutama harga minyak. Kondisi ekonomi Cina yang melambat berpotensi melambatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

“Hari ini nilai tukar Rupiah terhadap USD tertinggi dalam empat tahun terakhir. Jika Rupiah terus melemah, tentu BI akan menaikkan tingkat suku bunga kembali, dampaknya sektor riil akan terancam, daya beli akan semakin melemah dan ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Legislator PKS dari Dapil DKI Jakarta I ini menyebut target pertumbuhan 2024 di angka 5,3 persen terlampaui berat. Karena itu, perlu kerja keras dan ekstra usaha untuk mencapainya melihat kondisi perekonomian dan keuangan global yang masih sangat rentan.

uc/rdn

TARGET PERTUMBUHAN 2024 DI ANGKA 5,3 PERSEN TERLAMPAUI BERAT. KARENA ITU, PERLU KERJA KERAS DAN EKSTRA USAHA UNTUK MENCAPAINYA MELIHAT KONDISI PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN GLOBAL YANG MASIH SANGAT RENTAN.

Anis Byarwati

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Korpri DPR Lepas Pegawai yang Tunaikan Ibadah Haji

Sekretaris Dewan Pembina Koperasi Pegawai Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko melepas dan mendoakan 16 orang pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun 2024. Hal ini merupakan tradisi di Setjen DPR RI di mana setiap pegawai yang berangkat haji akan dilepas dengan berdoa bersama, agar selama menunaikan ibadah diberikan kemudahan, kelancaran, dan terutama kesehatan.

"Kita berkesempatan untuk silaturahmi dan juga kita mengucapkan selamat dan juga mendoakan kepada teman-teman

kita semuanya supaya perjalanan hajinya berangkat dari Jakarta sampai nanti kembali lagi ke tanah air, selalu dalam perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji baik yang wajib maupun yang sunnah bisa terlaksana dengan baik," kata Djaka di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5).

Tak hanya melepas secara simbolis delapan pegawai yang akan berangkat ke tanah suci, dalam acara ini juga menghadirkan penceramah dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI. Acara pelepasan Calon

Jemaah Haji ini terselenggara atas kerjasama Setjen DPR RI dengan KORPRI Setjen DPR RI serta Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI.

Sisi lain, untuk pekerjaan yang ditinggalkan selama haji, Djaka menjelaskan sudah ada prosedur tetap (protap) dan mekanisme yang mengatur agar tugas dan fungsi jabatan yang ditinggalkan tetap bisa berjalan. Di akhir wawancara, Djaka berharap para calon jemaah haji dari Setjen DPR RI ini dilancarkan ibadah hajinya dan nantinya menjadi haji yang mabrur serta pasca haji dapat memberikan kontribusi positif bagi kinerjanya di Setjen DPR RI.

we/aha



FOTO: AFR/PDT

Sekretaris Dewan Pembina Koperasi Pegawai Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko, dalam foto bersama usai acara pelepasan 16 pegawai yang akan menunaikan ibadah haji, di Ruang Rapat Setjen DPR RI.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Rawat Kebinekaan Lewat Magang Kampus Merdeka

Merawat Bineka Tunggal Ika menjadi keniscayaan yang harus dipegang teguh bagi setiap warga negara. Kesadaran bangga berbangsa inilah yang kemudian ditularkan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi kepada 350 mahasiswa Program Magang di Rumah Rakyat atau MDRR DPR RI Batch ke-4 Tahun 2024. Indra yang menjadi pembicara dalam kuliah umum dengan tema 'Membangun Kebhinekaan' itu berharap mahasiswa MDRR dapat menjadi penggambaran dari bagaimana Kebhinekaan terawat dengan baik di Indonesia.

"Hari ini teman-teman mahasiswa Magang di Rumah Rakyat di DPR ini menjadi salah satu pemilik

bangsa ini ke depan ya. Mereka lah yang akan terus melanjutkan keberlangsungan negara ini, bangsa ini, sebagai bangsa yang besar. Jangan sampai seperti negara-negara di beberapa kawasan yang akhirnya terpecah belah karena konflik yang diutamakan konfliknya perbedaannya bukan persatuannya," kata Indra di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

Lanjutnya, konsep Kebinekaan sebenarnya sudah tergambar di DPR RI. Dimana sebanyak 575 Anggota DPR RI adalah berasal dari 88 Daerah Pemilihan dari seluruh provinsi di Indonesia yang bersatu bersama menyampaikan aspirasinya hingga menciptakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini juga

tercermin dari mahasiswa MDRR yang juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Indra berharap, Kebinekaan yang ada di DPR tersebut dapat terus dirawat bersama dengan memupuk kesadaran untuk bersatu.

"Teman-teman mahasiswa ini pun juga sudah menggambarkan kebhinekaan. Mereka berasal dari hampir seluruh kampus 90-an lebih ya dari seluruh Indonesia dan juga asal muasal daerahnya juga beragam sekali. Itu juga menggambarkan kebhinekaan. Salah satu cara mempersatukan adalah kesamaan cara pandang kita, bahasa kita. Ini adalah Indonesia kecil, Indonesia mini, semua aspirasi dari seluruh pelosok negeri ini ada di sini baik langsung maupun tidak langsung," pungkasnya.

— **bia/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi, dalam foto bersama usai mengisi kuliah umum untuk mahasiswa MDRR DPR RI Batch ke-4 Tahun 2024 di Senayan.

Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.

"Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses memantapkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk

perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi," ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).

Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti *flow* kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

"Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis," terangnya.

Mereka juga diharapkan untuk dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri. — **we/rdn**



FOTO: EHN/PDT

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Keadilan Tangani Krisis Iklim

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul mengatakan, Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) DPR RI turut menyumbangkan pemikiran dalam proses legislasi perubahan iklim. Salah satunya melalui sejumlah rangkaian diskusi dan konsultasi bersama tenaga ahli fraksi dan komisi serta organisasi masyarakat sipil.

“BK menyelenggarakan seminar ini untuk menyerap masukan yang lebih luas dari para pihak terkait baik itu sebagai perwakilan parlemen, pemerintah, masyarakat sipil, maupun swasta,” pungkasnya dalam acara Seminar Internasional Perubahan Iklim di Hotel JS Luwansa, Selasa (7/5).

Dalam rangkaian diskusi tematik yang dilakukan, terdapat 3 isu penting yang perlu diperdalam. Pertama, aspek kelembagaan. Aspek ini penting untuk diatur secara jelas guna memperkuat kerangka kelembagaan yang mengelola



FOTO: TINPDI

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul dalam acara Seminar Internasional Perubahan Iklim di Hotel JS Luwansa, Selasa (7/5/2024).

kebijakan perubahan iklim di Indonesia serta mengkoordinasikan kepentingan dan kewajiban pihak-pihak di berbagai sektor terkait.

Kedua, aspek pembiayaan. Aspek ini tidak hanya mengatur

mengenai sumber pembiayaan pengelolaan perubahan iklim dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun juga mekanisme pembiayaan yang bersumber dari bantuan dan utang luar negeri, perdagangan karbon, pajak karbon, serta skema-skema lain yang penting diatur lebih baik.

Ketiga, aspek keadilan iklim. Pengelolaan perubahan iklim tentu perlu mengedepankan kepentingan nasional Indonesia, namun tidak hanya dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, namun juga guna melestarikan lingkungan hidup dan melindungi rakyat Indonesia dari ancaman bencana dan kerugian akibat perubahan iklim. **tn/aha**



BK MENYELENGGARAKAN SEMINAR INI UNTUK MENYERAP MASUKAN YANG LEBIH LUAS DARI PARA PIHAK TERKAIT BAIK ITU SEBAGAI PERWAKILAN PARLEMEN, PEMERINTAH, MASYARAKAT SIPIL, MAUPUN SWASTA.

Inosentius Samsul

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





PARLIAMENTARY MEETING ON THE OCCASION OF 10th WORLD WATER FORUM

MOBILIZING PARLIAMENTARY ACTION ON
WATER FOR SHARED PROSPERITY

19 - 22 MAY 2024

*Nusa Dua, Bali
Indonesia*

